

## MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Inspektorat Daerah Kota Solok.

PROGRAM : Penyelenggaraan Pengawasan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<b>Program :</b> Penyelenggaraan Pengawasan  <b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu  <b>Sub Kegiatan:</b> Pengawasan dengan tujuan tertentu  <b>Capaian Program :</b> Indeks Penguatan Pengawasan  <b>Tujuan :</b> - Berkurangnya tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk hibah - Meningkatnya kepatuhan instansi penerima hibah (KPU dan Bawaslu) terhadap pengelolaan keuangan daerah - Meningkatnya sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan</li> <li>Jumlah instansi penerima hibah Kota Solok = 2</li> <li>Jumlah APIP = 48</li> <li>Jumlah APIP yang sudah bersertifikasi 32 orang yang terdiri dari: a. JFA 17 orang b. PPUUD 11 orang c. Struktural 4 orang</li> <li>Laki-laki 18 orang</li> <li>Perempuan 14 orang</li> <li>Belanja Pengawasan dengan tujuan tertentu sebesar Rp.31.000.000</li> <li>Surat edaran nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Akses :</b> Perempuan lebih memiliki akses yang luas sebagai tim pemeriksa dalam melakukan tugas pengawasan yang berjumlah 32 orang</li> <li><b>Partisipasi :</b> Perempuan lebih telaten, teliti dan memiliki keuletan yang berjumlah 14 orang</li> <li><b>Kontrol :</b> Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan</li> <li><b>Manfaat :</b> Belum sepenuhnya hasil pemeriksaan sebagai pedoman bagi auditee dalam melaksanakan tugasnya yang akan datang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beban kerja yang semakin komplek</li> <li>Belum maksimalnya pemahaman pemeriksa terhadap audit hibah</li> <li>Keterbatasan jumlah SDM o pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan</li> <li>Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya</li> <li>Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Walikota atau aparat pengawas</li> <li>Perubahan system politik kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan</li> <li>Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tidak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat pengawas baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan Audit dana hibah kepada KPU dan Bawaslu</li> <li>Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih dalam pengelolaan anggaran hibah</li> <li>Memfaatkan hasil pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan yang akan datang dengan tujuan tidak ada temuan yang berulang dan LHP sebagai dasar pengambilan keputusan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan bagi APIP dalam audit dana hibah</li> <li>Sosialisasi kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penatausahaan keuangan</li> <li>Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan</li> <li>Audit Kepatuhan dan SPI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurut data kepegawaian Inspektorat Kota Solok jumlah Tim Pemeriksaan sebanyak 32 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 15 orang perempuan</li> <li>Pemeriksaan dengan tujuan tertentu tergantung dengan permintaan Kepala daerah, pengaduan masyarakat dll</li> </ul>	<b>Output:</b> Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan tertentu yang diperiksa  <b>Outcome:</b> Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan yang di TL

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
pengendalian intern instansi penerima hibah (KPU dan Bawaslu) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	Walikota Tahun 2024							

Solok, Juni 2023





# GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN : 2024

Program	Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan	Reviu Laporan Keuangan
Tujuan Kegiatan	Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Indikator Kinerja Kegiatan	- Persentase RKA dan Laporan Keuangan Pemerintah yang baik dan sesuai aturan
Analisa Situasi	<p>a. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah</p> <p>b. Jumlah instansi penerima hibah Kota Solok = 2</p> <p>c. Jumlah APIP = 48</p> <p>d. Jumlah APIP yang sudah bersertifikasi 32 orang yang terdiri dari: a. JFA 17 orang</p> <p>b. PPUPD 11 orang</p> <p>c. Struktural 4 orang</p> <p>e. Laki-laki 18 orang</p> <p>f. Perempuan 14 orang</p> <p>g. Reviu dokumen Perencanaan 31 OPD (PUG, RKA, RKAP, KUAPPAS dll) dan Reviu LAKIP, LKPD dll</p> <p><b>Faktor Kesenjangan :</b></p> <p><b>Akses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan lebih memiliki akses yang luas sebagai tim pemeriksa dalam melakukan tugas pengawasan sehingga menghasilkan laporan pemeriksaan yang berkualitas karna lebih teliti dan mempunyai keuletan</li> </ul> <p><b>Manfaat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum sepenuhnya hasil pemeriksaan sebagai pedoman bagi auditee dalam melaksanakan tugasnya yang akan datang dan Tidak ada pengaruh terhadap proses penyusunan Penganggaran</li> </ul> <p><b>Penyebab Internal Kesenjangan Gender :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya pemahaman pemeriksa terhadap implementasi PPRG</li> <li>- Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan</li> <li>- Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya</li> <li>- Telah menempatkan proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan</li> <li>- Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini</li> <li>- Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan</li> <li>- Beban kerja yang semakin kompleks</li> </ul> <p><b>Penyebab Eksternal Kesenjangan Gender :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dilaporkan oleh masyarakat kepada Walikota atau aparat pengawas</li> <li>- Perubahan system politik kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan</li> <li>- Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tidak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas</li> <li>- Pelaksanaan PPRG dalam skala nasional belum berjalan maksimal</li> <li>- Sosialisasi untuk para pemeriksa belum maksimal</li> </ul> <p><b>Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat pengawas baik perempuan maupun laki-laki untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan 31 OPD ((PUG, RKA, RKAP, KUAPPAS dll) dan Reviu LAKIP, LKPD dll</li> <li>- Terwujudnya akuntabilitas pemerintahan yang baik dan bersih dalam pengelolaan Keuangan mulai perencanaan sampai pelaporan</li> <li>- Memanfaatkan Laporan hasil pemeriksaan (Evaluasi) dalam pengambilan</li> </ul>

	keputusan
Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pemeriksaan Review atas Dokumen Perencanaan dan Laporan 31 OPD</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan wawasan aparatur pengawasan</li> <li>- Evaluasi SPIP dan pencegahan korupsi</li> </ul>
Alokasi Sumber Daya	Anggaran Rp 75.000.000,-
Dampak/hasil output kegiatan	- Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Keuangan Pemerintah yang direview

